

KONFLIK SOSIAL: SUATU TINJAUAN TEORITIS SOSIOLOGIS

Zainal Hidayat *)

Abstract

Social dis-integration is still a latent problem faced by the Indonesians up to the present time. As a big archipelago country with more than 230 million inhabitants scattered in thousands of islands, the intensity of social conflict always present and there is a tendency to increase. This article describes about social conflict based on sociological theoretical perspective. Basic factors which can arise social conflict are pluralities in religion and ethnic, disharmonious relationship between the majority and the minority, disparity between the poor and the rich, disparity between centre and periphery, as well as disparity between periphery and periphery. But actually all of these factors are based on inequality in the distribution of life resources and social position.

Key words: Social conflict, sociological theory, pluralistic society, unequal distribution.

A. Pendahuluan

Persoalan konflik sosial (*social conflict*) hingga kini masih mendominasi perhatian serta keprihatinan semua pihak. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, nampaknya persoalan konflik sosial menunjukkan intensitas yang terus meningkat.

Dilihat dari skala terjadinya, konflik sosial sungguh amatlah beragam bentuk dan sebab-musababnya. Dilihat dari lingkup atau cakupan wilayah konflik dapat ditengarai adanya konflik yang terjadi dalam lingkup lokal, regional atau antar wilayah, maupun nasional. Sedangkan dimensi yang mewarnai konflik dapat terkait dengan berbagai persoalan yang meliputi persoalan politik (termasuk ideologi), ekonomi, sosial, budaya, maupun agama atau keyakinan. Dari aspek cakupan wilayah maupun dimensi yang mewarnai timbulnya konflik sosial, masing-masing dapat saja berdiri sendiri-sendiri, namun tidak jarang yang terjadi justru saling koherensi. Apabila hal ini terjadi dapat dipastikan akibat yang ditimbulkan selain lebih luas dan besar kerugiannya, sudah barang tentu tidak mudah upaya penyelesaiannya.

Dalam mengkaji persoalan konflik sosial, kita dapat melakukannya melalui dua pendekatan. Pertama, melalui pendekatan mikro, yakni mengkaji secara mendalam kasus per kasus sebab musabab terjadinya, serta merumuskan secara teknis upaya penyelesaiannya. Kedua, melalui pendekatan makro, yakni mengkaji secara umum atas berbagai fenomena konflik sosial dengan menggunakan pemikiran teoritis atau sudut pandang tertentu, sebagai landasan guna mengembangkan pemikiran

secara ilmiah. Melalui pendekatan yang kedua inilah tulisan ini dibuat untuk mengkaji secara teoritis atas berbagai fenomena konflik sosial.

B. Pembahasan

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji persoalan melalui pendekatan makro, yakni melihat secara menyeluruh berbagai fenomena konflik sosial yang terjadi di berbagai tempat di negeri ini.

Untuk memeperjelas apa yang akan dibahas dalam tulisan ini, pokok masalah akan difokuskan pada persoalan mengapa seringkali timbul konflik sosial di negeri ini? Sekali lagi perlu ditegaskan disini bahwa tulisan ini tidak dimaksudkan untuk melihat suatu persoalan secara *one shoot analysis* atau analisis selesai satu kali tembakan, tetapi lebih sekedar mencoba menganalisis berdasarkan pada pemikiran teoritis tertentu, sehingga sangat terbuka kemungkinan suatu analisis lain yang didasarkan pada cara pandang yang berbeda.

Teori "Lampu Sorot"

Hakekat teori sesungguhnya adalah suatu ungkapan gagasan yang menggambarkan keterkaitan secara logis antara suatu peristiwa dengan peristiwa lain. Dengan demikian suatu tinjauan teoritis tidak lain adalah suatu usaha untuk menggambarkan secara analitis keterkaitan antar berbagai peristiwa.

Kendatipun pembahasan secara teoritis dapat saja bersifat spekulatif, namun yang paling penting adalah bahwa kajian teoritis sedapat mungkin mampu menjelaskan tentang suatu kenyataan atau realitas sosial. Karl R. Popper dalam pernyataannya

mengemukakan bahwa teori tidak lain adalah “jaring yang kita lemparkan untuk menangkap alam kenyataan – untuk merasionalisasikan, menerangkan dan menguasainya (dalam Dahrendorf, 1986:89).

Perlu disadari bahwa dalam upaya menggambarkan tentang kenyataan sungguh tidak akan pernah dicapai kesempurnaan, sehingga mengkaji sesuatu secara teoritis tidak lain adalah sebuah pilihan atau seleksi, yakni hal-hal yang dapat dijelaskan dan hal-hal yang tidak mampu diungkapkan. Dalam konteks ini Popper menganalogikan pengkajian secara teoritis ibarat orang menggunakan “lampu sorot”. Apakah “lampu sorot” dapat menerangi sesuatu sehingga jelas kelihatan tergantung pada posisinya, cara kita menyorotnya, intensitas sorotannya, warnanya dan sebagainya; juga sangat tergantung pada sesuatu yang disoroti (dalam Dahrendorf, 1986:122). Dengan kata lain mengkaji secara teoritis disengaja atau tidak pasti akan menghasilkan gambaran sisi terang yang secara jelas kelihatan, sementara ada sisi gelap yang sama sekali tidak kelihatan atau sengaja tidak dilihat yang sudah barang tentu tidak akan menggambarkan.

Konflik Sosial

Manakala kita mengandaikan bahwa perjalanan kehidupan masyarakat Indonesia itu diibaratkan sebagai suatu episode drama kehidupan, maka berbicara tentang kondisi solidaritas dan integrasi sosial masyarakat Indonesia diibaratkan sebagai suatu episode drama yang adegan para pemainnya penuh dengan “darah dan air mata”. Bila kita memandang potret wajah bangsa Indonesia, di satu sisi akan nampak tampilan gambar wajah yang ramah, penuh senyum, fantastik, menarik serta eksotik. Namun jujur harus diakui bahwa di balik tampilan gambar keelokan wajah seperti itu tak dapat disembunyikan adanya tampilan gambar wajah yang kontradiktif yakni wajah yang seram, sadis, penuh luka cakar berlumur darah. Apa yang ingin disampaikan dalam metafora tersebut adalah bahwa kehidupan berbangsa kita dewasa ini masih banyak diwarnai oleh konflik sosial.

Kendatipun pandangan semacam itu dapat saja ditafsirkan amat subyektif, sinis, dan bahkan terkesan apatis; namun secara obyektif harus pula diakui bahwa wajah bangsa Indonesia saat ini selalu tampil dalam warna yang penuh konflik. Berbagai peristiwa seperti yang terjadi di Papua, Nangro Aceh Darussalam, Poso, Sampit, serta beberapa peristiwa

konflik dalam setiap kegiatan pemilu, pilpres, pilkada; konflik pemekaran wilayah, konflik pembebasan tanah, penggusuran hunian, pasar, kaki lima, konflik perburuhan, dan bahkan konflik yang didasari perbedaan faham keagamaan dan sebagainya, kesemuanya itu tak pelak merupakan kondisi obyektif yang menggambarkan wajah masyarakat Indonesia.

Konflik sosial sesungguhnya merupakan fenomena sosial yang alamiah biasa. Artinya sebagai sebuah fenomena sosial hampir selalu terjadi dalam setiap masyarakat. Konflik sosial sesungguhnya merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang berbentuk pertentangan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok yang berbeda etnik (suku bangsa, ras, agama, golongan), karena di antara mereka memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai-nilai, serta kebutuhan atau kepentingan (Liliweri, 2005:146). Seringkali konflik itu dimulai dengan hubungan pertentangan antara dua atau lebih etnik, baik individu-individu atau kelompok yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan satu sama lain.

Dalam perspektif teoritis, George Simmel bahkan berpandangan bahwa terbentuknya masyarakat yang integratif sesungguhnya terjadi melalui konflik antar kelompok masyarakat yang dalam posisi superior dengan mereka yang subordinat (Soekanto dan Lestari, 1988:69-70). Melalui konflik tersebut pada akhirnya kelompok-kelompok masyarakat yang bertikai akan mengembangkan naluri kasih sayangnya sehingga akan membentuk hubungan sosial yang serasi. Sejalan dengan pandangan tersebut Dahrendorf menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat - dalam setiap hal – memperlihatkan pertikaian dan pertentangan; dengan kata lain pertentangan sosial terdapat di mana-mana (Dahrendorf, 1986:197- 200). Setiap unsur dalam masyarakat dia katakan memberikan kontribusi terhadap perpecahan. Oleh karena itu untuk membentuk suatu masyarakat perlu didasarkan atas penggunaan kekuasaan oleh sejumlah anggota terhadap anggotanya yang lain. Dalam pandangan tersebut sesungguhnya merupakan derifasi atau modifikasi dari filsafat politiknya Hobbes tentang kekacau-balauan “perang antara semua melawan semua” (*bellum omnium contra omnes*) yang oleh Rousseau hal itu akan berhenti karena diintegrasikan oleh “persetujuan bersama” (*volunte generale*).

Dari beberapa pandangan tersebut diatas

kiranya dapat disimpulkan bahwa konflik sosial pada hakekatnya adalah merupakan bagian dari sejarah kehidupan masyarakat. Dengan kata lain bahwa konflik selalu *inheren* dalam setiap masyarakat. Namun yang pasti, penting untuk disadari bahwa berkembangnya anggapan “keharusan” adanya korban manusia sebagai konsekuensi logis atas akibat dari terjadinya konflik sosial sebagai kejadian yang perlu dimaklumi, haruslah ditolak. Dengan demikian apa yang pernah dinyatakan oleh Collins (1978:hal ix) bahwa melihat persoalan konflik semata-mata lebih sebagai suatu realitas dan bukan sebagai sesuatu yang baik atau buruk, tidak dapat sepenuhnya disetujui. Bagaimanapun timbulnya korban manusia selalu berhadapan dengan persoalan nilai-nilai sosial (*social values*), etika, moral, norma, serta hukum.

Masyarakat Plural

Secara sosio-antropologis masyarakat Indonesia dapat digolongkan kedalam masyarakat plural (*plural societies*). Masyarakat plural yang dimaksudkan di sini menggambarkan suatu keadaan masyarakat dimana setiap individu atau kelompok yang berbeda-beda dapat memperkaya peran mereka dalam suatu masyarakat sebagai *social fabric* (Liliweri, 2005:65). Dengan demikian dengan melihat masyarakat sebagai sebuah sistem sosial, maka masing-masing unsur yang ada berperan secara fungsional.

Konsep masyarakat plural untuk pertama kali digunakan oleh Furnivall guna menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Hindia-Belanda. Menurut Furnivall masyarakat plural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik (Nasikun, 1984:31). Pengertian semacam ini kendatipun untuk masa kini kurang relevan, namun harus diakui bahwa melalui gagasan Furnivall di antaranya kita dapat memperoleh gambaran tentang masyarakat plural. Baginya masyarakat plural itu adalah masyarakat yang secara struktural memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat diversi, ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai dan konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat, serta sering timbulnya konflik sosial.

Pluralitas masyarakat Indonesia adalah fakta bahwa bangsa ini meliputi lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda-beda, masing-masing memiliki identitas kebudayaan (sub kebudayaan) sendiri-sendiri (Geertz, 1981:1), serta mendiami wilayah

yang tersebar di sekitar garis katulistiwa yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Masing-masing etnis tersebut dengan sendirinya terikat ke dalam ikatan-ikatan primordial. Dalam menggambarkan kebhinekaan etnis bangsa Indonesia ini Harsja W. Bachtiar menyebutnya masing-masing etnis yang ada itu sebagai nasion-nasion pribumi atau nasion-nasion lama yang sudah ada sebelum nasion Indonesia ini berdiri (Bachtiar, 1976:7). Setiap nasion lama membatasi dengan jelas siapa yang dianggap merupakan bagian dari kesatuan solidaritas dan siapa yang dianggap orang luar. Keanekaragaman etnis semacam ini memberikan warna akan kebhinekaan bangsa Indonesia, namun seringkali menyimpan potensi yang dapat memicu timbulnya konflik sosial. Mengingat berbagai ikatan primordial yang ada seringkali mengembangkan sikap etnosentris, yakni suatu kebiasaan bahwa setiap kelompok menganggap kebudayaan kelompoknyalah yang paling baik (Sumner dalam Horton and Hunt, 1984:79). Perbedaan cara pandang serta perilaku yang telah terinternalisasi menjadi tata kelakuan bagi suatu kelompok etnis tertentu acapkali dipersepsikan secara berbeda oleh kelompok etnis lain, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik sosial.

Demikian halnya dengan pluralitas agama, Indonesia merupakan wilayah dimana berkembang enam agama-agama besar di dunia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) serta berbagai kepercayaan lokal yang hingga kini masih banyak dianut oleh para pengikutnya. Melalui ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing pemeluknya senantiasa selalu ditanamkan prinsip-prinsip tentang ketuhanan, kemanusiaan, serta keadilan. Namun adanya kesamaan prinsip yang dimiliki oleh setiap agama ternyata belum mampu menjadi faktor intergratif. Islam melalui ajaran *rahmatan lil'aalamiin* (rahmat bagi seluruh alam semesta) serta Kristen dan Katholik dengan ajaran “kasih” pada sesama umat manusia, ternyata oleh masing-masing pemeluknya ajaran tersebut belum sepenuhnya mampu menjadi faktor pemersatu, menumbuhkan rasa persaudaraan atas dasar prinsip kemanusiaan. Begitu pula dengan umat beragama dan kepercayaan lainnya. Berbagai peristiwa konflik sosial inter maupun antar umat beragama masih banyak ditemukan justru berkaitan dengan hal-hal yang bersifat instrumental, kendatipun masing-masing memiliki kesamaan prinsip secara fundamental.

Selain pluralitas etnis dan agama, masyarakat Indonesia juga memiliki persoalan yang

menyangkut hubungan antara mayoritas dan minoritas, yakni etnis pribumi dengan warga keturunan Cina. Berbagai studi terdahulu telah mencatat bahwa ada masa dimana hubungan antara kedua kelompok sosial ini mengalami "pasang surut harmoni dan disharmoni". Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan semacam ini. Namun perlu disampaikan di sini apa yang pernah dikemukakan oleh J.A.C. Mackie bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi ketidak harmonisan hubungan atau konflik antara golongan pribumi dengan etnis keturunan Cina adalah adanya keyakinan umum pada golongan pribumi bahwa "dominasi ekonomi" orang-orang Cina melalui jaringan usaha yang tidak dapat ditembus, adanya ikatan persaudaraan, cara-cara mendapatkan kapital, kontak-kontak perdagangan dan informasi pasar, telah memberikan keuntungan yang besar bagi mereka dibanding golongan pribumi (Mackie dalam Paulus, 1976:64-68). Kendatipun masalah ini sekarang sudah mengalami banyak perubahan, terutama kini telah banyak golongan pribumi yang bergerak di sektor industri dan perdagangan sementara golongan etnis keturunan Cina telah mulai memasuki kegiatan di sektor politik dan pemerintahan, tidak berarti bahwa persoalan konflik antara mayoritas dan minoritas sudah selesai. Bisa jadi fenomena konflik ini masih merupakan gejala laten yang setiap saat masih saja dapat muncul ke permukaan terutama apabila terjadi ketidak-stabilan politik dan ekonomi yang dialami pemerintah Indonesia.

Selain berbagai persoalan pluralitas sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, adalah suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia juga masih harus dihadapkan dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan kesenjangan antara yang kaya dan miskin, hubungan antara pusat dan daerah, kesenjangan antar daerah dan sebagainya yang kesemuanya itu merupakan faktor yang ikut mewarnai terjadinya konflik sosial.

Distribusi Sumber-Sumber Kebutuhan Hidup

Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa seringkali terjadinya konflik sosial hampir selalu berhubungan dengan sumber-sumber kebutuhan hidup yang terbatas. Melalui sumber-sumber kebutuhan hidup ini baik individu-individu maupun kelompok-kelompok sosial tidak hanya akan terjamin kelangsungan hidupnya, namun sekaligus juga akan mendudukkan pada posisi mana di dalam kehidupan ini seseorang semestinya ditempatkan. Dengan demikian keberlangsungan hidup sekaligus posisi dalam stratifikasi sosial sangat ditentukan

oleh seberapa besar kepemilikan sumber-sumber kebutuhan hidup yang dapat dikumpulkan.

Dengan meminjam pemikiran Marx yang terkenal sangat deterministik materialistis, bahwa sumber-sumber kebutuhan hidup yang dimaksud adalah suatu bentuk kepemilikan kapital sebagai alat produksi (dalam Giddens, 1986:44-46). Melalui kepemilikan kapital seseorang akan menempatkan diri dalam struktur sosial yang dinamakan "kelas kapitalis" yang berkuasa, sementara mereka yang tidak memiliki kapital akan menempati posisi sebagai "kelas pekerja". Selanjutnya dikatakan bahwa hubungan antara pemilik kapital dengan kaum pekerja lebih mencerminkan hubungan konflik yang mengarah pada dominasi. Dengan kata lain, bahwa jika seseorang dapat menguasai kapital maka dengan sendirinya akan memiliki kemampuan dominatif. Disinilah letak pemikiran Marx yang deterministik materialistis itu, bahwa penguasaan di bidang ekonomi akan sangat menentukan seberapa besar kekuasaan yang dimiliki.

Berbeda dengan pemikiran Marx yang deterministik, Weber lebih melihat bahwa sumber-sumber kebutuhan hidup dan kedudukan sosial itu tidak semata-mata bersumber pada faktor ekonomi (Marx : kapital), akan tetapi juga pada kekuasaan politik serta budaya, yang dalam hal ini dikatakannya sebagai prestise (dalam Johnson, 1986: 222-226). Melalui kekuasaan politik seseorang akan dapat memperoleh atau menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol orang lain. Sedangkan dengan prestisennya seseorang akan mendapatkan penghargaan atau penghormatan sesuai dengan gaya hidupnya. Melalui pemikirannya yang demikian ini maka sesungguhnya dapat dinyatakan bahwa Weber lebih memiliki pandangan yang multidimensional, sehingga dapat dimaknai bahwa upaya untuk memperoleh sumber-sumber kebutuhan hidup serta kedudukan sosial relatif lebih luas kesempatannya untuk bisa didapatkan oleh seseorang, dan tidak harus selalu didasarkan pada penguasaan dalam bidang ekonomi.

C. Penutup

Terlepas dari perbedaaan pandangan antara Marx dan Weber tersebut, yang terpenting relevansi dari kedua pemikiran di atas bagi masyarakat Indonesia yang plural adalah bahwa apapun bentuk sumber-sumber kebutuhan hidup yang ada haruslah dapat didistribusikan sedemikian rupa sehingga dapat dicapai secara lebih adil dan merata.

Dengan demikian tidak lagi ada dominasi sumber-sumber kebutuhan hidup dan kedudukan sosial oleh kelompok-kelompok tertentu. Terbukti, cara-cara semacam ini hingga kini telah banyak menimbulkan konflik sosial.

Daftar Pustaka

- Bachtiar, Harsja W. Masalah Integrasi Nasional di Indonesia (dalam majalah Prima Edisi No: 8 Tahun V. Integrasi Nasional di Tenga Persaingan Kesetiaan) Penerbit LP3ES Jakarta. 1976.
- Collin, Randall. 1975, *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science*. Academic Press. New York San Francisco London.
- Craib, Ian. 1986. *Teori-Teori Sosial Modern*. (penerjemah Paul S. Baut dan T. Effendi). Penerbit CV. Jakarta : Rajawali.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritis (penerjemah Ali Mandan). Jakarta : CV. Rajawali.
- Geertz, Hildred. 1981. *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia* (diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin). Jakarta : Penerbit Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan FIS UI.
- Giddens, Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern* (penerjemah Soheba Kramadibrata). Jakarta.: Penerbit Universitas Indonesia.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1* (diterjemahkan oleh Robert. M.Z. Lawang). Jakarta : PT. Gramedia.
- Liliweri, Alio. 2005. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta : Penerbit LKIS Pelangi Aksara.
- Mackie, J.A.C. 1976. *The Chinese in Indonesia*, (diterjemahkan oleh B.P. Paulus). "Masalah Cina: Hasil Penelitian Ilmiah di Beberapa Negara Asia dan Australia. Bandung : Penerbit PT Karya Nusantara.
- Mely G Tan (editor). 1979. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Nasikun. 1984. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Poloma, Margaret. M. 1987. *Sosiologi Kontemporer* (diterjemahkan oleh: TIM YASOGAMA). Jakarta : CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono dan Ratih Lestari. 1988. *Fungsionalisma dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Turner, Jonathan H. 1978. *The Structure of Sociological Theory*. Revised Edition. Illinois : The Dorsey Press Homewood.